

**ANALISIS PENGELOLAAN ARSIP DIGITAL TERKAIT DOKUMEN BATAS
DAERAH DALAM MENDUKUNG TRANSFORMASI DIGITAL DI LINGKUNGAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

Laura Amelia Rahma¹, Rizki Syafril²

^{1,2} Universitas Negeri Padang

Alamat e-mail : lauramelia rahma@gmail.com¹, rizkisyafri l@fis.unp.ac.id²

ABSTRACT

Digital archive management has become a crucial component in supporting the digital transformation of regional government administration, particularly in the management of regional boundary documents classified as vital archives. This study aims to analyze the management of digital archives related to regional boundary documents in supporting digital transformation within the Government of West Sumatra Province. The study employed a qualitative approach using a descriptive research design. Data were collected through direct observation, interviews, and documentation during a 40-working-day professional internship conducted at the Bureau of Government and Regional Autonomy of the Regional Secretariat of West Sumatra Province from January 5 to March 5, 2026. The research participants consisted of employees involved in archival management and document administration activities. Data analysis was carried out through the stages of data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The findings indicate that the implementation of digital archive management has made a positive contribution to improving administrative efficiency, facilitating document retrieval, strengthening archival security, and supporting the implementation of digital-based governance. The digitization of regional boundary documents has reduced the risk of document loss and damage while enhancing accessibility for authorized parties. Nevertheless, several challenges remain, including limited human resource competencies in digital archival management, archival systems that are not yet fully integrated, and the need to strengthen operational procedures and technological infrastructure. The study concludes that the management of digital archives related to regional boundary documents within the Government of West Sumatra Province has been implemented relatively well and plays a strategic role in supporting the digital transformation of regional governance. This research contributes to the development of public sector archival management studies and recommends strengthening human resources, infrastructure, and integrated digital archival systems to support sustainable digital governance.

Keywords: *Digital Archive Management, Regional Boundary Documents, Digital Transformation, Public Administration, Vital Archives*

ABSTRAK

Pengelolaan arsip digital menjadi salah satu komponen penting dalam mendukung transformasi digital administrasi pemerintahan daerah, khususnya pada pengelolaan dokumen batas daerah yang tergolong sebagai arsip vital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan arsip digital terkait dokumen batas daerah dalam mendukung transformasi digital di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung, wawancara, dan dokumentasi selama pelaksanaan magang profesi selama 40 hari kerja di Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat sejak 05 Januari hingga 05 Maret 2026. Partisipan penelitian terdiri dari pegawai yang terlibat dalam kegiatan pengelolaan arsip dan administrasi dokumen. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pengelolaan arsip digital memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan efisiensi administrasi, kemudahan temu kembali dokumen, penguatan keamanan arsip, serta mendukung penerapan tata kelola pemerintahan berbasis digital. Digitalisasi dokumen batas daerah mampu mengurangi risiko kehilangan dan kerusakan dokumen serta meningkatkan aksesibilitas bagi pihak yang berwenang. Namun demikian, masih ditemukan beberapa kendala, seperti keterbatasan kompetensi sumber daya manusia di bidang kearsipan digital, sistem arsip yang belum sepenuhnya terintegrasi, serta perlunya penguatan prosedur operasional dan infrastruktur teknologi. Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan arsip digital terkait dokumen batas daerah di Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah berjalan cukup baik dan memiliki peran strategis dalam mendukung transformasi digital pemerintahan daerah. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian manajemen kearsipan sektor publik serta merekomendasikan penguatan sumber daya manusia, infrastruktur, dan sistem arsip digital terintegrasi guna mendukung tata kelola pemerintahan digital yang berkelanjutan.

Kata Kunci: Pengelolaan Arsip Digital, Dokumen Batas Daerah, Transformasi Digital, Administrasi Publik, Arsip Vital

A. Pendahuluan

Pada zaman sekarang yang dimana semakin ketatnya persaingan dalam mendapatkan pekerjaan. Banyaknya perkembangan besar yang menjadi breakthrough dalam dunia kerja, baik dalam hal transformasi digital, perubahan pola

kerja, serta kebutuhan akan keterampilan baru. Oleh sebab itu, dunia kerja menuntut untuk mendapatkan sumber daya manusia yang unggul dan kompetitif. Menanggapi tuntutan ini, institusi perguruan tinggi memiliki peran penting sebagai salah satu wadah

untuk menyiapkan mahasiswa yang memiliki kemampuan yang baik di bidangnya guna siap dalam menghadapi perkembangan dan persaingan global di dunia kerja (Aman et al., 2023). Dan selama perkuliahan sebagian besar mahasiswa telah memperoleh teori, dan untuk mempraktekkan serta memperdalam teori-teori yang telah didapat mahasiswa membutuhkan wadah yang bersedia untuk menerapkan ilmu yang telah diperolehnya selama perkuliahan. Sehingga setiap mahasiswa memiliki bekal sebelum terjun ke dunia kerja yang sebenarnya.

Dilihat dalam aturan regulasi yang ada di lingkungan perguruan tinggi di Indonesia yang merujuk pada peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang pendirian, perubahan, pencabutan izin Perguruan Tinggi Swasta, yang mengatur standar dari Pendidikan tinggi termasuk didalamnya pelaksanaan praktik kerja (magang) sebagai bagian dari kegiatan Tridarma (Pendidikan & Indonesia, 2020). Lebih lanjut, kegiatan magang merupakan implementasi dari kebijakan Merdeka Belajar yang memberikan hak kepada mahasiswa untuk mengasah skill dan kemampuan melalui praktik langsung di dunia kerja (Baharuddin, 2021). Hal ini bertujuan untuk menciptakan lulusan yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga siap menghadapi dunia kerja dengan pengalaman dan jejaring yang kuat (Wynda, 2025).

Sebagai Perguruan Tinggi, Universitas Negeri Padang menyadari akan keterkaitan yang besar antara dunia kampus dengan dunia pekerjaan baik itu dalam lingkup instansi maupun Perusahaan. Untuk itu, Universitas Negeri Padang memfasilitasi mahasiswa melalui kegiatan magang sebagai bagian dari pembelajaran berbasis pengalaman, yang tidak hanya memperkuat pemahaman akademik, tetapi juga membekali mahasiswa dengan keterampilan dan etika kerja yang dibutuhkan di dunia professional. Melalui program magang yang telah dicetuskan dan dilaksanakan diharapkan hard dan soft skills dari mahasiswa akan terbentuk. Departemen Ilmu Administrasi Negara yang merupakan salah satu departemen yang ada di lingkungan Universitas Negeri Padang juga menjadikan magang ke dalam mata kuliah wajib, yang di golongan kedalam magang profesi dimana tujuan dari magang profesi ini agar mahasiswa dapat memperoleh pengalaman dalam tata kelola administrasi langsung di tempat magang.

Magang profesi sebagai bagian dari proses pendidikan tinggi yang berbasis kompetensi, dilaksanakan selama 40 hari kerja. Kegiatan ini dilaksanakan di berbagai instansi pemerintah maupun sektor industri sebagai upaya dalam mengintegrasikan teori yang diperoleh selama perkuliahan dengan praktik langsung di dunia kerja. Dimana akhir dari magang profesi ini diharapkan mahasiswa mendapatkan

pengalaman terkait pelaksanaan administrasi yang meliputi proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kegiatan organisasi, serta memahami dinamika kerja di lingkungan instansi maupun sektor industri secara langsung. Pengalaman tersebut diharapkan mampu meningkatkan kompetensi profesional mahasiswa dan menjadi bekal dalam menghadapi dunia kerja setelah menyelesaikan pendidikan.

Magang profesi menjadi sarana untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa terhadap dinamika administrasi publik dan tata Kelola organisasi, sekaligus mengembangkan kemampuan teknis, etika profesional, dan keterampilan kerja yang lain (Tiarani & Hidayati, 2024). Dengan keterlibatan langsung dalam aktivitas organisasi tempat magang, mahasiswa diharapkan mampu mengasah kemampuan analisis, komunikasi serta adaptasi terhadap lingkungan kerja yang kompleks.

Secara umum magang profesi bertujuan untuk: 1) Magang memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menerapkan teori yang telah dipelajari di kelas ke dalam situasi nyata. 2) Magang membantu dalam pengembangan keterampilan lunak (soft skills) seperti komunikasi, manajemen waktu, kerja tim, dan penyelesaian masalah. 3) Magang memberikan kesempatan untuk membangun jaringan dengan profesional di bidang mereka. 4) Magang memberikan wawasan tentang dinamika dan tren terbaru dalam industri maupun instansi. 5)

Sarana untuk mencari talenta yang baru (Yusuf et al., 2025).

Dengan adanya kegiatan magang profesi, ada beberapa manfaat yang didapatkan: 1) Bagi Mahasiswa a) Memperoleh praktik dunia kerja mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi pada unit-unit kerja dengan mengembangkan wawasan berpikir keilmuan kreatif dan inovatif. b) Membuat laporan magang berdasarkan pengamatan yang selanjutnya dapat dikembangkan oleh mahasiswa dalam pembuatan skripsi. 2) Bagi Departemen Ilmu Administrasi Negara a) Memperoleh umpan balik atau feedback guna menyempurnakan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan stakeholder di lingkungan kerja. b) Membangun jejaring dengan instansi ataupun perusahaan tempat magang. 3) Bagi instansi atau perusahaan tempat magang a) Mendapatkan bantuan pemikiran, tenaga, ilmu dan teknologi dalam penyelesaian tugas unit kerja instansi ataupun perusahaan tempat magang. b) Menumbuhkan kerja sama yang saling menguntungkan, dinamis dan bermanfaat dengan institusi pendidikan, dimana instansi ataupun perusahaan dapat memperoleh informasi terkait dengan perkembangan ilmu yang sedang berkembang (Zaharani et al., 2025).

Sebagai Perguruan Tinggi, Universitas Negeri Padang menyadari akan keterkaitan yang besar antara dunia kampus dengan dunia pekerjaan baik itu dalam lingkup instansi maupun Perusahaan.

Untuk itu, Universitas Negeri Padang memfasilitasi mahasiswa melalui kegiatan magang sebagai bagian dari pembelajaran berbasis pengalaman, yang tidak hanya memperkuat pemahaman akademik, tetapi juga membekali mahasiswa dengan keterampilan dan etika kerja yang dibutuhkan di dunia profesional. Melalui program magang yang telah dicetuskan dan dilaksanakan diharapkan hard dan soft skills dari mahasiswa akan terbentuk. Departemen Ilmu Administrasi Negara yang merupakan salah satu departemen yang ada di lingkungan Universitas Negeri Padang juga menjadikan magang ke dalam mata kuliah wajib, yang di golongan kedalam magang profesi dimana tujuan dari magang profesi ini agar mahasiswa dapat memperoleh pengalaman dalam tata kelola administrasi langsung di tempat magang.

Perkembangan transformasi digital di sektor publik mendorong pemerintah daerah untuk melakukan perubahan dalam sistem administrasi dan tata kelola informasi, termasuk pada pengelolaan arsip pemerintahan. Digitalisasi arsip menjadi salah satu strategi penting untuk meningkatkan efisiensi administrasi, mempercepat akses informasi, memperkuat keamanan data, serta mendukung penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik. Dalam konteks pemerintahan daerah, pengelolaan arsip digital memiliki posisi strategis karena berkaitan langsung dengan keberlangsungan administrasi,

akuntabilitas, serta pengambilan keputusan organisasi.

Salah satu arsip yang memiliki tingkat kepentingan tinggi dalam administrasi pemerintahan daerah adalah dokumen batas daerah. Dokumen batas daerah dikategorikan sebagai arsip vital karena memuat informasi hukum dan administratif terkait penetapan wilayah pemerintahan, penyelesaian sengketa batas wilayah, perencanaan pembangunan, serta pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah. Kehilangan, kerusakan, maupun keterbatasan akses terhadap dokumen tersebut dapat menimbulkan dampak administratif dan hukum yang signifikan. Oleh karena itu, diperlukan sistem pengelolaan arsip yang mampu menjamin keamanan, keutuhan, dan kemudahan akses dokumen melalui penerapan sistem arsip digital.

Secara teoritis, pengelolaan arsip digital menekankan prinsip keautentikan, keandalan, integritas, dan keterpakaian arsip sebagaimana dikemukakan oleh Basuki Sulistyo (2014) serta Sugiarto dan Wahyono (2015). Sementara itu, konsep transformasi digital menurut Westerman, Bonnet, dan McAfee (2014) menjelaskan bahwa pemanfaatan teknologi digital tidak hanya ditujukan untuk mengganti sistem manual, tetapi juga mentransformasi proses kerja organisasi agar lebih efektif, efisien, dan adaptif terhadap perubahan. Dalam lingkungan pemerintahan Indonesia, implementasi transformasi digital diwujudkan melalui Sistem

Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018.

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa digitalisasi arsip memberikan dampak positif terhadap peningkatan efisiensi administrasi dan kemudahan temu kembali dokumen. Penelitian mengenai pengelolaan arsip digital pada instansi pemerintahan umumnya berfokus pada implementasi sistem kearsipan elektronik, efektivitas pelayanan administrasi, dan pemanfaatan teknologi informasi dalam tata kelola dokumen pemerintahan. Penelitian lain juga menyoroti pentingnya digitalisasi arsip dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas birokrasi. Namun demikian, sebagian besar penelitian terdahulu masih berorientasi pada pengelolaan arsip administratif umum dan belum secara spesifik mengkaji pengelolaan arsip digital yang berkaitan dengan dokumen batas daerah sebagai arsip vital pemerintahan.

Berdasarkan hasil telaah penelitian sebelumnya, ditemukan adanya kesenjangan penelitian (*research gap*), yaitu masih terbatasnya kajian yang menganalisis implementasi pengelolaan arsip digital pada dokumen batas daerah dalam konteks transformasi digital pemerintahan daerah. Padahal dokumen batas daerah memiliki karakteristik khusus karena mengandung nilai hukum, administratif, dan strategis yang berbeda dibandingkan arsip

pemerintahan lainnya. Selain itu, penelitian mengenai hubungan pengelolaan arsip digital dokumen batas daerah dengan upaya transformasi digital di lingkungan pemerintah daerah juga masih relatif terbatas.

Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada fokus kajian yang menganalisis pengelolaan arsip digital terkait dokumen batas daerah sebagai arsip vital dalam mendukung transformasi digital pemerintahan daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Penelitian ini tidak hanya membahas proses digitalisasi arsip, tetapi juga mengidentifikasi kontribusi pengelolaan arsip digital terhadap efisiensi administrasi, keamanan dokumen, aksesibilitas informasi, serta hambatan implementasinya pada unit pemerintahan yang menangani urusan batas wilayah.

Penelitian ini berlandaskan pada teori pengelolaan arsip digital, teori arsip vital, dan teori transformasi digital administrasi publik. Teori pengelolaan arsip digital digunakan untuk menganalisis proses penciptaan, penyimpanan, pemeliharaan, dan temu kembali arsip elektronik. Teori arsip vital digunakan untuk menjelaskan pentingnya perlindungan dokumen batas daerah, sedangkan teori transformasi digital digunakan untuk melihat kontribusi digitalisasi arsip terhadap perubahan tata kelola administrasi pemerintahan.

Fokus penelitian ini diarahkan pada implementasi pengelolaan arsip digital terkait dokumen batas daerah

di Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat, meliputi proses digitalisasi arsip, sistem pengelolaan dokumen, manfaat implementasi, serta kendala yang dihadapi dalam mendukung transformasi digital pemerintahan daerah.

Berdasarkan uraian tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengelolaan arsip digital terkait dokumen batas daerah dalam mendukung transformasi digital di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, mengidentifikasi kontribusinya terhadap efektivitas administrasi pemerintahan, serta menganalisis berbagai hambatan yang muncul dalam implementasi sistem pengelolaan arsip digital.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami dan mendeskripsikan secara mendalam proses pengelolaan arsip digital terkait dokumen batas daerah dalam mendukung transformasi digital di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Penelitian deskriptif digunakan untuk menggambarkan kondisi nyata mengenai implementasi pengelolaan arsip digital, kendala yang dihadapi, serta kontribusinya terhadap efektivitas administrasi pemerintahan daerah. Desain penelitian yang digunakan adalah studi lapangan (field research) melalui kegiatan magang profesi di

Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Penelitian dilakukan secara langsung pada lingkungan kerja yang menjadi objek penelitian sehingga peneliti dapat memperoleh data berdasarkan pengalaman, pengamatan, dan keterlibatan langsung dalam aktivitas pengelolaan arsip digital. Kegiatan penelitian dilaksanakan selama 40 hari kerja, terhitung sejak tanggal 05 Januari sampai dengan 05 Maret 2026. Partisipan dalam penelitian ini meliputi pegawai dan staf pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang terlibat dalam pengelolaan arsip dan administrasi dokumen batas daerah. Teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling, yaitu pemilihan informan secara sengaja berdasarkan pertimbangan bahwa informan memiliki pengetahuan dan keterlibatan langsung terhadap pengelolaan arsip digital di lingkungan instansi tersebut. Instrumen penelitian utama adalah peneliti sendiri (human instrument) yang didukung dengan pedoman observasi, pedoman wawancara, dan dokumentasi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung terhadap proses digitalisasi arsip, wawancara dengan pegawai terkait, serta dokumentasi berupa arsip digital, dokumen administrasi, foto kegiatan, dan catatan lapangan selama pelaksanaan magang. Observasi dilakukan untuk melihat secara langsung proses pengelolaan arsip digital, sedangkan wawancara

digunakan untuk memperoleh informasi mengenai pelaksanaan, manfaat, dan kendala pengelolaan arsip digital dalam mendukung transformasi digital pemerintahan daerah. Teknik analisis data menggunakan model analisis interaktif yang terdiri atas tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilih dan menyederhanakan data yang relevan dengan fokus penelitian. Selanjutnya data disajikan secara sistematis dalam bentuk uraian deskriptif agar mudah dipahami. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi yang telah dianalisis sehingga diperoleh gambaran mengenai implementasi pengelolaan arsip digital terkait dokumen batas daerah dalam mendukung transformasi digital di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

C. Hasil Penelitian dan

Pembahasan

Hasil

A. Aspek-Aspek Teoritis

1. Konsep Pengelolaan Arsip Digital

Pengelolaan arsip digital merupakan kegiatan pengelolaan dokumen yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk mendukung proses administrasi pemerintahan. Arsip digital tidak hanya berasal dari

hasil alih media arsip konvensional berbentuk kertas, tetapi juga mencakup arsip yang sejak awal diciptakan dalam format elektronik (born digital). Dalam konteks pemerintahan, pengelolaan arsip digital menjadi bagian penting dalam mendukung penyelenggaraan administrasi yang efisien, cepat, dan tertib (Sulistyo-Basuki, 2014).

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan menjelaskan bahwa arsip merupakan rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara dalam penyelenggaraan pemerintahan. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, bentuk dan media arsip mengalami perubahan, sehingga sistem pengelolaan arsip juga dituntut untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan digital agar mampu menjawab kebutuhan administrasi yang semakin kompleks dan dinamis (Republik Indonesia, 2009).

Menurut Sugiarto dan Wahyono (2015), pengelolaan arsip digital harus memperhatikan prinsip keautentikan, keutuhan, keandalan, dan keterpakaian arsip. Prinsip-prinsip tersebut bertujuan agar arsip digital tetap memiliki nilai pembuktian hukum dan dapat dipertanggungjawabkan meskipun tidak lagi berbentuk fisik. Dengan sistem pengelolaan yang baik, arsip digital mampu menjadi sumber informasi yang valid dan

terpercaya bagi pengambilan keputusan pemerintahan.

Selama kegiatan magang, penulis mengamati bahwa penerapan arsip digital memberikan kemudahan dalam proses pencarian dokumen administrasi, terutama dokumen yang sering digunakan dalam kegiatan pemerintahan. Penggunaan arsip digital juga mengurangi ketergantungan terhadap arsip fisik yang rentan rusak akibat usia, kelembapan, maupun kesalahan penanganan. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan arsip digital berperan penting dalam mendukung kelancaran kerja aparatur pemerintahan serta meningkatkan efisiensi administrasi (Sulistyo-Basuki, 2014).

2. Konsep Dokumen Batas Daerah sebagai Arsip Vital

Arsip vital merupakan arsip yang memiliki nilai sangat penting bagi keberlangsungan operasional suatu organisasi dan tidak dapat digantikan apabila mengalami kerusakan atau kehilangan. Arsip Nasional Republik Indonesia menyatakan bahwa arsip vital berkaitan langsung dengan aspek hukum, administratif, dan strategis suatu lembaga, sehingga memerlukan pengelolaan dan perlindungan khusus agar keberadaannya tetap terjamin (ANRI, 2019).

Dokumen batas daerah termasuk dalam kategori arsip vital karena memiliki nilai hukum yang

tinggi sebagai bukti resmi penetapan wilayah administrasi pemerintahan. Dokumen ini menjadi dasar dalam pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah, perencanaan pembangunan wilayah, serta penyelesaian potensi konflik atau sengketa batas wilayah antar daerah. Kehilangan atau kerusakan dokumen batas daerah dapat menimbulkan dampak serius, baik secara administratif maupun hukum (ANRI, 2019).

Menurut Ricks, Swafford, dan Gow (2018), arsip yang memiliki nilai vital harus dikelola dengan sistem pengamanan yang ketat, termasuk penggandaan arsip dan penyimpanan dalam media yang aman. Dalam konteks pemerintahan daerah, digitalisasi dokumen batas daerah merupakan salah satu strategi perlindungan arsip vital agar tetap terjaga keutuhannya dan mudah diakses ketika diperlukan.

Berdasarkan pengamatan penulis selama kegiatan magang di Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, dokumen batas daerah diperlakukan sebagai dokumen penting yang harus dijaga kerahasiaan dan keutuhannya. Digitalisasi arsip dilakukan sebagai langkah preventif untuk mengurangi risiko kehilangan dan kerusakan arsip fisik, sekaligus mempermudah proses penelusuran dokumen ketika dibutuhkan oleh pihak yang berwenang (Sulistyo-Basuki, 2014).

3. Konsep Transformasi Digital dalam Administrasi Pemerintahan Daerah

Transformasi digital dalam administrasi pemerintahan merupakan proses perubahan mendasar dalam tata kelola birokrasi melalui pemanfaatan teknologi digital yang terintegrasi ke dalam seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan. Transformasi ini tidak hanya menitikberatkan pada penggunaan perangkat teknologi, tetapi juga menyentuh aspek struktural, prosedural, dan kultural dalam organisasi pemerintahan. OECD (2019) menegaskan bahwa transformasi digital di sektor publik bukan sekadar penerapan teknologi informasi, melainkan suatu perubahan menyeluruh terhadap proses kerja, budaya organisasi, serta pola pelayanan publik agar menjadi lebih adaptif, transparan, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, transformasi digital menuntut perubahan cara berpikir aparatur pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Menurut Indrajit (2016), keberhasilan transformasi digital dalam pemerintahan sangat ditentukan oleh kesiapan sumber daya manusia, infrastruktur teknologi, serta komitmen pimpinan organisasi. Tanpa dukungan faktor-faktor tersebut, digitalisasi hanya akan menjadi

perubahan teknis tanpa memberikan dampak signifikan terhadap kinerja pemerintahan.

Lebih lanjut, Westerman, Bonnet, dan McAfee (2014) menjelaskan bahwa transformasi digital terjadi ketika organisasi memanfaatkan teknologi digital secara strategis untuk meningkatkan kinerja organisasi, memperluas jangkauan layanan, serta menciptakan nilai publik yang lebih besar. Dalam konteks pemerintahan daerah, transformasi digital tidak hanya berfungsi untuk meningkatkan efisiensi internal birokrasi, tetapi juga untuk memperbaiki kualitas interaksi antara pemerintah dan masyarakat. Pemerintah daerah dituntut mampu menghadirkan layanan publik yang cepat, mudah diakses, dan akuntabel melalui pemanfaatan teknologi digital yang terintegrasi.

Di Indonesia, transformasi digital dalam administrasi pemerintahan daerah diwujudkan melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. SPBE menjadi kerangka nasional dalam mengintegrasikan teknologi informasi ke dalam proses administrasi pemerintahan, termasuk perencanaan, pengelolaan keuangan, pelayanan publik, serta pengelolaan arsip dan dokumen pemerintahan. Melalui SPBE, pemerintah daerah diarahkan

untuk meninggalkan pola kerja manual dan beralih ke sistem digital yang terstandar, terintegrasi, dan berkelanjutan.

Salah satu aspek penting dalam transformasi digital administrasi pemerintahan daerah adalah pengelolaan arsip secara digital. Arsip digital berperan sebagai sumber utama informasi dan bukti administratif dalam setiap pengambilan keputusan dan penyelenggaraan pelayanan publik. Pengelolaan arsip digital memungkinkan proses penciptaan, penyimpanan, pencarian, dan pemanfaatan arsip dilakukan secara lebih efisien dan aman dibandingkan dengan sistem konvensional berbasis kertas. Selain itu, digitalisasi arsip juga mendukung transparansi dan akuntabilitas pemerintahan karena arsip dapat ditelusuri dan dipertanggungjawabkan secara sistematis.

Dengan demikian, transformasi digital dalam administrasi pemerintahan daerah bertujuan untuk meningkatkan efisiensi kerja birokrasi, mempercepat proses pelayanan publik, serta memperkuat prinsip transparansi dan akuntabilitas. Keberhasilan transformasi digital sangat bergantung pada kesiapan sumber daya manusia, dukungan infrastruktur teknologi, serta komitmen organisasi dalam mengubah budaya kerja birokrasi. Oleh karena itu, pengelolaan arsip digital tidak

hanya dipandang sebagai kegiatan teknis, tetapi sebagai bagian strategis dari reformasi birokrasi dan modernisasi tata kelola pemerintahan daerah.

Selama kegiatan magang, penulis mengamati bahwa transformasi digital di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mulai diterapkan secara bertahap, khususnya dalam pengelolaan surat dan arsip. Pemanfaatan sistem elektronik dalam administrasi pemerintahan menunjukkan adanya upaya peningkatan efisiensi kerja dan ketertiban administrasi. Arsip digital menjadi bagian penting dalam mendukung kelancaran administrasi serta penyimpanan data pemerintahan secara terintegrasi dan berkelanjutan.

B. Temuan dalam Proses Magang

1. Implementasi Pengelolaan Arsip Digital terkait Dokumen Batas Daerah Provinsi Sumatera Barat

Berdasarkan hasil observasi selama pelaksanaan kegiatan magang di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, pengelolaan arsip digital, khususnya yang berkaitan dengan dokumen batas daerah, telah mulai diimplementasikan sebagai bagian dari upaya transformasi digital dalam administrasi pemerintahan daerah. Dokumen batas daerah yang sebelumnya banyak disimpan dalam bentuk arsip fisik secara bertahap dialihkan dan

dikelola melalui sistem kearsipan berbasis elektronik guna meningkatkan efektivitas pengelolaan informasi pemerintahan.

Dalam praktiknya, dokumen batas daerah disimpan dan dikelola dalam sistem arsip digital yang memungkinkan proses pencatatan, pengklasifikasian, serta temu kembali arsip dilakukan secara lebih cepat dan terstruktur. Penerapan sistem ini bertujuan untuk meningkatkan keamanan arsip, mengurangi risiko kehilangan atau kerusakan dokumen penting, serta mempermudah akses bagi unit kerja yang membutuhkan informasi terkait batas wilayah. Hal ini sangat penting mengingat dokumen batas daerah merupakan arsip vital yang memiliki nilai hukum dan administratif tinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Implementasi pengelolaan arsip digital tersebut sejalan dengan pendapat Read dan Ginn (2011) yang menyatakan bahwa sistem arsip elektronik mampu mempercepat proses temu kembali arsip serta meminimalkan risiko kehilangan arsip vital melalui pengelolaan yang terstandar dan terintegrasi. Melalui sistem digital, arsip batas daerah dapat ditelusuri secara lebih akurat berdasarkan klasifikasi dan metadata yang telah ditentukan, sehingga mendukung kelancaran kerja

aparatur pemerintah dalam menjalankan tugas administratif dan pengambilan keputusan.

Meskipun demikian, hasil observasi selama magang menunjukkan bahwa implementasi pengelolaan arsip digital di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat masih menghadapi beberapa kendala. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki

kompetensi khusus di bidang kearsipan digital. Tidak seluruh aparatur memiliki pemahaman yang memadai terkait pengelolaan arsip elektronik, mulai dari proses input data, penataan arsip digital, hingga pemeliharaan sistem. Selain itu, masih diperlukan peningkatan konsistensi dalam pembaruan dan pengelolaan data arsip agar sistem yang digunakan dapat berfungsi secara optimal dan berkelanjutan.

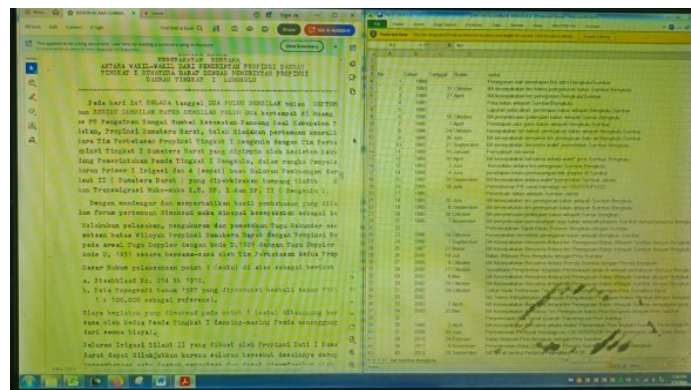
Selain faktor sumber daya manusia, tantangan lain yang ditemukan adalah kebutuhan akan penguatan infrastruktur teknologi dan kebijakan internal yang mendukung pengelolaan arsip digital secara menyeluruh. Beberapa unit kerja masih menerapkan sistem pengelolaan arsip secara kombinasi antara manual dan digital, yang berpotensi menimbulkan ketidaksinkronan data. Kondisi ini menunjukkan bahwa proses transformasi digital belum sepenuhnya merata dan

memerlukan koordinasi yang lebih kuat antarunit kerja.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa meskipun pengelolaan arsip digital dokumen batas daerah telah berjalan dan memberikan dampak positif terhadap efisiensi kerja birokrasi, proses transformasi digital masih memerlukan penguatan lebih lanjut. Penguatan tersebut meliputi peningkatan kapasitas aparatur melalui pelatihan kearsipan digital, penyempurnaan

infrastruktur teknologi informasi, serta penetapan kebijakan internal yang jelas dan konsisten. Dengan langkah-langkah tersebut, implementasi pengelolaan arsip digital di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat diharapkan dapat semakin mendekati konsep ideal pengelolaan arsip digital sebagaimana dikemukakan oleh para ahli dan mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang modern dan akuntabel.

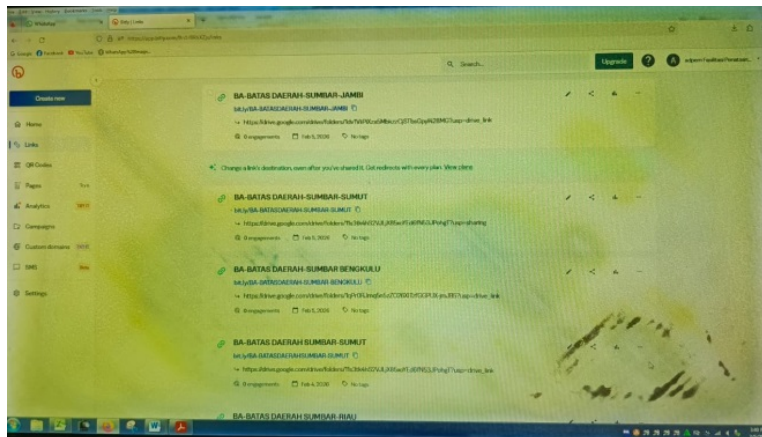
Gambar 1. Mengonversi dokumen fisik ke dalam arsip digital terkait batas wilayah Provinsi Sumatera Barat



Kegiatan konversi dokumen fisik ke dalam arsip digital terkait batas wilayah Provinsi Sumatera Barat dilakukan sebagai upaya perlindungan dan pengamanan arsip vital pemerintahan. Dokumen batas wilayah yang sebelumnya tersimpan dalam bentuk fisik dialihmediakan ke format digital melalui proses pemindaian dan pengelolaan arsip elektronik. Digitalisasi ini bertujuan

untuk mengurangi risiko kerusakan dan kehilangan arsip, sekaligus mempermudah proses pencarian dan pemanfaatan dokumen ketika dibutuhkan. Melalui pengelolaan arsip digital, dokumen batas wilayah dapat disimpan secara lebih aman, tertata, dan mendukung pelaksanaan transformasi digital dalam administrasi pemerintahan daerah.

Gambar 2. Penginputan dan pembuatan tautan *bit.ly* untuk memudahkan akses dokumen Berita Acara batas wilayah antar Provinsi



Kegiatan penginputan dan pembuatan tautan *bit.ly* dilakukan untuk mempermudah akses terhadap dokumen Berita Acara batas wilayah antar provinsi yang telah dikelola secara digital. Dalam kegiatan ini, dokumen yang sebelumnya tersimpan dalam sistem arsip digital diunggah dan kemudian dibuatkan tautan singkat menggunakan layanan *bit.ly* agar dapat diakses dengan cepat dan praktis oleh pihak yang berwenang. Pembuatan tautan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dalam distribusi informasi, mengurangi ketergantungan pada pengiriman dokumen fisik, serta mendukung tertib administrasi pemerintahan. Kegiatan ini juga merupakan bagian dari upaya transformasi digital dalam pengelolaan arsip, sehingga akses terhadap dokumen penting dapat dilakukan secara lebih mudah, cepat, dan terkontrol.

Dalam kegiatan magang ini, dilakukan digitalisasi arsip dokumen batas daerah yang sebelumnya tersimpan dalam bentuk fisik. Proses digitalisasi meliputi pemindaian

dokumen, penamaan file secara sistematis, serta penyimpanan arsip dalam folder terstruktur sesuai wilayah dan jenis dokumen. Langkah ini bertujuan untuk mempermudah akses, pencarian, dan pengelolaan arsip, sekaligus mendukung transformasi digital di lingkungan pemerintahan Provinsi Sumatera Barat.

Sebagai hasil digitalisasi, diperoleh arsip digital dalam bentuk file PDF yang tersimpan secara terstruktur dan dapat diakses secara daring melalui tautan berikut:

1. Batas Daerah Sumatera Barat-Bengkulu: <https://bit.ly/BA-BATASDAERAH-SUMBAR-BENGKULU>
2. Batas Daerah Sumatera Barat – Sumatera Utara: <https://bit.ly/BA-BATASDAERAH-SUMBAR-SUMUT>
3. Batas Daerah Sumatera Barat – Jambi: <https://bit.ly/BA-BATASDAERAH-SUMBAR-JAMB I>
4. Batas Daerah Sumatera Barat – Riau: <https://bit.ly/BA->

BATASDAERAHSUMBAR- RIAU

Keberadaan arsip digital ini memberikan kontribusi signifikan terhadap transformasi digital di Provinsi Sumatera Barat. Beberapa manfaat yang diperoleh antara lain peningkatan efisiensi, karena waktu pencarian dan distribusi dokumen fisik berkurang secara signifikan; peningkatan keamanan, karena risiko kerusakan, kehilangan, atau manipulasi dokumen dapat diminimalkan; serta kemudahan akses bagi pegawai dan pihak terkait yang membutuhkan arsip untuk perencanaan dan pengambilan keputusan. Selain itu, digitalisasi arsip juga mendukung transparansi dalam pengelolaan dokumen batas daerah, sehingga instansi terkait dapat memonitor dan mengevaluasi dokumen secara lebih mudah dan akurat.

Secara keseluruhan, digitalisasi arsip dokumen batas daerah ini menjadi bukti nyata dari implementasi transformasi digital di lingkungan pemerintahan Provinsi Sumatera Barat, sekaligus mendukung peningkatan kinerja, efektivitas, dan kualitas layanan administrasi publik.

Pembahasan

Secara teoritis, pengelolaan arsip digital bertujuan untuk menciptakan sistem administrasi yang lebih efisien, tertib, dan mudah diakses. Temuan selama magang menunjukkan bahwa digitalisasi dokumen batas daerah telah membantu mempercepat proses

pencarian dan pemanfaatan arsip dalam kegiatan administrasi pemerintahan. Dokumen yang sebelumnya membutuhkan waktu lama untuk ditemukan dalam arsip fisik kini dapat diakses dengan lebih cepat melalui penyimpanan digital. Kondisi ini mendukung efisiensi kerja aparatur serta memperlancar koordinasi antarbagian maupun dengan instansi terkait.

Dari perspektif dokumen batas daerah sebagai arsip vital, implementasi pengelolaan arsip digital memberikan manfaat yang signifikan dalam menjaga keamanan dan keutuhan arsip. Sebagaimana dijelaskan dalam teori kearsipan, arsip vital memerlukan perlindungan khusus karena memiliki nilai hukum dan strategis yang tinggi. Selama kegiatan magang, penulis mengamati bahwa digitalisasi dokumen batas daerah berfungsi sebagai bentuk pengamanan arsip melalui penyediaan salinan digital (backup) dari arsip fisik. Hal ini mampu meminimalkan risiko kehilangan atau kerusakan dokumen akibat faktor usia arsip, kesalahan penanganan, maupun kondisi lingkungan.

Selain itu, pengelolaan arsip digital yang diterapkan juga mendukung proses transformasi digital dalam administrasi pemerintahan daerah. Digitalisasi arsip menjadi bagian dari penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), khususnya dalam pengelolaan informasi dan dokumentasi pemerintahan. Penulis menilai bahwa penggunaan arsip digital telah mendorong perubahan

pola kerja aparatur ke arah yang lebih modern, efisien, dan berbasis teknologi, meskipun implementasinya masih berada pada tahap pengembangan.

Dari sisi kelebihan dan manfaat, pengelolaan arsip digital dokumen batas daerah memberikan kemudahan akses informasi, meningkatkan efisiensi waktu kerja, serta memperkuat perlindungan arsip vital. Arsip digital juga membantu mengurangi ketergantungan pada arsip fisik yang rentan rusak dan memerlukan ruang penyimpanan yang besar. Selain itu, digitalisasi arsip mendukung transparansi dan akuntabilitas administrasi pemerintahan karena data dapat ditelusuri dan dipertanggungjawabkan dengan lebih baik.

Namun demikian, penulis juga menemukan beberapa kendala dalam implementasi pengelolaan arsip digital. Dari aspek sumber daya manusia, masih terdapat keterbatasan kemampuan sebagian aparatur dalam mengoperasikan sistem digital dan memahami prinsip pengelolaan arsip digital secara menyeluruh. Kondisi ini menyebabkan proses digitalisasi dan pengelolaan arsip belum berjalan secara optimal dan merata di seluruh bagian.

Dari aspek sistem, pengelolaan arsip digital masih bersifat semi-terintegrasi dan belum sepenuhnya didukung oleh sistem kearsipan digital yang terpusat. Arsip digital sebagian besar disimpan dalam perangkat kerja internal,

sehingga berpotensi menimbulkan duplikasi data dan keterbatasan akses lintas unit. Selain itu, sistem pengamanan data digital masih perlu ditingkatkan untuk menjamin keamanan arsip vital secara jangka panjang.

Sementara itu, dari aspek prosedur kerja, penulis menemukan bahwa standar operasional prosedur (SOP) terkait pengelolaan arsip digital, khususnya dokumen batas daerah, masih perlu diperkuat dan disosialisasikan secara menyeluruh. Beberapa proses pengelolaan arsip digital masih bergantung pada kebiasaan kerja aparatur, bukan sepenuhnya mengacu pada pedoman tertulis yang baku. Padahal, secara teoritis, keberhasilan pengelolaan arsip digital sangat ditentukan oleh kejelasan prosedur dan konsistensi pelaksanaannya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pengelolaan arsip digital terkait dokumen batas daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memberikan dampak positif terhadap peningkatan efisiensi administrasi, kemudahan temu kembali dokumen, perlindungan arsip vital, serta mendukung pelaksanaan transformasi digital pemerintahan daerah. Temuan ini sejalan dengan pendapat Basuki Sulistyو (2014) yang menyatakan bahwa pengelolaan arsip digital berfungsi untuk meningkatkan efektivitas penyimpanan informasi dan mempercepat akses dokumen dalam kegiatan administrasi.

Temuan penelitian juga mendukung pandangan Read dan

Ginn (2010) yang menjelaskan bahwa sistem arsip elektronik mampu meningkatkan kecepatan pencarian dokumen, mengurangi risiko kehilangan arsip, serta memperkuat sistem pengendalian dokumen organisasi. Dalam penelitian ini, digitalisasi dokumen batas daerah terbukti mempermudah proses penelusuran arsip dan mengurangi ketergantungan terhadap dokumen fisik yang rentan mengalami kerusakan.

Selain itu, hasil penelitian memiliki kesesuaian dengan konsep arsip vital yang dikemukakan ANRI (2019), bahwa arsip yang memiliki nilai hukum dan administratif tinggi memerlukan perlindungan khusus melalui sistem pengamanan berlapis, termasuk digitalisasi dan penyimpanan cadangan (*backup system*). Dokumen batas daerah yang diteliti memiliki karakteristik sebagai arsip vital karena menjadi dasar hukum administrasi wilayah, sehingga digitalisasi menjadi bentuk mitigasi risiko terhadap kehilangan maupun kerusakan arsip.

Namun demikian, penelitian ini menunjukkan perbedaan dengan beberapa kajian terdahulu yang umumnya berfokus pada digitalisasi arsip administratif umum dan pelayanan publik. Penelitian ini lebih menitikberatkan pada pengelolaan dokumen batas daerah sebagai arsip vital yang memiliki dimensi hukum, administratif, dan strategis dalam tata kelola pemerintahan daerah. Dengan demikian, penelitian ini memperluas kajian pengelolaan arsip digital ke

dalam konteks administrasi pemerintahan berbasis kewilayahan.

Temuan mengenai keterbatasan sumber daya manusia dan belum optimalnya integrasi sistem arsip juga sejalan dengan teori transformasi digital dari Westerman, Bonnet, dan McAfee (2014) yang menjelaskan bahwa keberhasilan transformasi digital tidak hanya ditentukan oleh teknologi, tetapi juga dipengaruhi oleh kesiapan sumber daya manusia, budaya organisasi, dan dukungan sistem kerja yang terintegrasi.

Temuan penelitian memberikan beberapa implikasi, baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini memperkuat konsep bahwa pengelolaan arsip digital tidak hanya berfungsi sebagai sistem penyimpanan informasi, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam mendukung transformasi digital administrasi pemerintahan daerah. Penelitian ini turut memperluas pengembangan kajian manajemen arsip digital, khususnya pada pengelolaan dokumen batas daerah sebagai bagian dari arsip vital pemerintahan.

Secara praktis, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi arsip digital dapat meningkatkan efisiensi birokrasi melalui percepatan proses pencarian dokumen, pengurangan penggunaan arsip fisik, serta peningkatan aksesibilitas data bagi pihak yang berwenang. Digitalisasi dokumen batas daerah juga berpotensi memperkuat sistem pengambilan keputusan, perencanaan wilayah, dan penyelesaian persoalan administratif

yang berkaitan dengan batas pemerintahan.

Selain itu, penelitian ini memberikan implikasi kebijakan bagi pemerintah daerah mengenai pentingnya penguatan sistem pengelolaan arsip digital melalui peningkatan kompetensi sumber daya manusia, pengembangan infrastruktur teknologi informasi, integrasi sistem arsip elektronik, serta penyusunan standar operasional prosedur yang lebih terstruktur. Langkah tersebut diperlukan agar transformasi digital tidak hanya berhenti pada proses digitalisasi dokumen, tetapi mampu menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel.

Implikasi lain dari penelitian ini adalah perlunya integrasi pengelolaan arsip digital dengan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), sehingga dokumen batas daerah dapat dikelola secara terpusat, aman, dan mudah diakses oleh unit kerja terkait dalam mendukung administrasi pemerintahan berbasis digital.

Penelitian ini masih memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan dalam interpretasi hasil penelitian. Pertama, penelitian dilaksanakan dalam ruang lingkup terbatas, yaitu pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat, sehingga hasil penelitian belum dapat digeneralisasikan pada seluruh instansi pemerintah daerah yang memiliki karakteristik pengelolaan arsip berbeda.

Kedua, waktu pelaksanaan penelitian relatif singkat karena dilakukan selama kegiatan magang profesi selama 40 hari kerja, sehingga pengamatan terhadap implementasi pengelolaan arsip digital belum dapat menggambarkan perkembangan sistem secara longitudinal maupun perubahan kebijakan dalam jangka panjang.

Ketiga, penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang lebih menitikberatkan pada pemahaman proses dan pengalaman lapangan, sehingga belum mengukur secara kuantitatif tingkat efektivitas sistem arsip digital, efisiensi waktu kerja, maupun indikator keberhasilan transformasi digital secara statistik.

Keempat, penelitian lebih berfokus pada aspek implementasi pengelolaan arsip digital dokumen batas daerah dan belum menganalisis secara mendalam aspek keamanan siber, interoperabilitas sistem, perlindungan data digital, serta integrasi arsip dengan platform SPBE secara menyeluruh.

Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas lokasi penelitian pada beberapa pemerintah daerah, menggunakan pendekatan campuran (*mixed methods*), serta mengembangkan analisis mengenai integrasi arsip digital, keamanan informasi, dan efektivitas implementasi transformasi digital pemerintahan.

Berdasarkan pembahasan tersebut, penulis menyimpulkan bahwa pengelolaan arsip digital

dokumen batas daerah di Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat telah memberikan kontribusi positif terhadap efisiensi administrasi pemerintahan, perlindungan arsip vital, dan transformasi digital. Namun, upaya tersebut masih memerlukan penguatan dari aspek sumber daya manusia, sistem, dan prosedur kerja agar dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan.

D. Kesimpulan

Magang profesi merupakan salah satu bentuk pembelajaran yang bertujuan untuk memberikan mahasiswa kesempatan dalam memperoleh wawasan serta pengalaman langsung di dunia kerja, dengan menerapkan teori dan pengetahuan yang telah dipelajari selama masa perkuliahan. Melalui kegiatan ini, mahasiswa dapat mengasah kompetensi dan keterampilan melalui berbagai pengalaman praktis yang dijumpai di lapangan. Penulis sendiri telah menyelesaikan kegiatan magang di Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat selama 40 hari kerja, terhitung sejak tanggal 05 Januari hingga 05 Maret 2026.

Berdasarkan hasil pengamatan dan keterlibatan langsung selama kegiatan magang, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan arsip digital, khususnya yang berkaitan dengan dokumen batas daerah, memiliki peran strategis dalam mendukung kelancaran administrasi pemerintahan daerah. Dokumen batas daerah merupakan arsip vital yang memiliki nilai hukum dan administratif tinggi, sehingga

keberadaannya harus dijaga dari risiko kerusakan, kehilangan, maupun penyalahgunaan. Upaya digitalisasi arsip yang dilakukan di lingkungan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah menjadi langkah penting dalam menjaga keamanan arsip serta mempermudah akses dan penelusuran dokumen ketika dibutuhkan.

Pelaksanaan pengelolaan arsip digital di Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat secara umum telah berjalan cukup baik. Hal ini terlihat dari adanya upaya sistematis dalam pengumpulan, penginputan, penyimpanan, dan pendokumentasian arsip pemerintahan ke dalam bentuk digital. Digitalisasi arsip membantu meningkatkan efisiensi kerja aparatur, mempercepat proses administrasi, serta mendukung penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan arsip digital terkait dokumen batas daerah di Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat telah berjalan cukup baik dan berada pada jalur yang tepat dalam mendukung transformasi digital pemerintahan daerah. Dengan adanya peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penyempurnaan sistem digital, serta penguatan koordinasi antarperangkat daerah, pengelolaan arsip digital diharapkan dapat berjalan lebih optimal dan berkontribusi nyata dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel.

E. Daftar Pustaka

- Aman, A., Raharjo, T. J., Khafid, M., & Supriyanto, T. (2023, June). Peran dan strategi Perguruan Tinggi dalam membentuk SDM unggul yang berjiwa creativepreneurship di era society 5.0. *In Prosiding Seminar Nasional Pascasarjana* (Vol. 6, No. 1, pp. 7-12).
- Arsip Nasional Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia tentang Program Arsip Vital*. Jakarta: ANRI.
- Baharuddin, M. R. (2021). Adaptasi kurikulum merdeka belajar kampus merdeka (Fokus: model MBKM program studi). *Jurnal studi guru dan pembelajaran*, 4(1), 195-205.
- Basuki Sulistyo. (2014). *Pengantar Ilmu Kearsipan*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Indonesia. (2009). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Indrajit, R. E. (2016). *Electronic government: Strategi pembangunan dan pengembangan sistem pelayanan publik berbasis teknologi digital*. Yogyakarta: Andi.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Kemendagri.
- LAN & BPKP. (2000). *Akuntabilitas dan Good Governance*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
- Mardiasmo. (2002). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Pendidikan, K., & Indonesia, K. R. (2020). *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta*. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- Read, J., & Ginn, M. L. (2010). *Records management* (9th ed.). Mason, OH: Cengage Learning.
- Ricks, B. R., Swafford, A. J., & Gow, K. F. (2018). *Information and image management: A records systems approach*. Ohio: Thomson South-Western.
- Sedarmayanti. (2009). *Good Governance: Kepemerintahan yang Baik dalam Rangka Otonomi Daerah*. Bandung: Mandar Maju.
- Sugiarto, A., & Wahyono, T. (2015). *Manajemen kearsipan modern: Dari konvensional ke basis komputer*. Yogyakarta: Gava Media.
- Tiarani, N. A., & Hidayati, R. (2024).

- Integrasi Pelatihan Dalam Pendidikan NonFormal Dalam Magang Untuk Pengembangan Profesional: Studi Kasus BKD Provinsi Banten. *AMANAHA: Jurnal Ilmiah Ilmu Manajemen*, 2(2), 86-91.
- UNDP. (1997). *Governance for Sustainable Human Development*. New York: United Nations Development Programme.
- Westerman, G., Bonnet, D., & McAfee, A. (2014). *Leading digital: Turning technology into business transformation*. Boston, MA: Harvard Business Review Press.
- Wynda, H. (2025). The Transformasi Pendidikan Tinggi: Mengasah Soft skills untuk Menjawab Tantangan Kerja di Era Society 5.0. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 9(1), 91-102.
- Yusuf, M., Nurjanah, S., Sahdana, L. W., Mahardika, A. N., Pristianti, N., Nanda, A. K., ... & Adhitya, F. (2025). Mendalami Praktik Audit Profesional Melalui Pengalaman Magang di Kantor Akuntan Publik Arnestesa Sebagai Persiapan Karier di Dunia Kerja. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Mentari*, 1(9), 383-394.
- Zaharani, G., Dewi, L. A. T., & Nisa, N. K. (2025). Dinamika Pengembangan Karir Pada Mahasiswa Yang Mengikuti Program Magang MBKM. *Resilience: Journal Of Psychology*, 1(4), 9-16.